

**EMPOWERMENT OF BEEF CATTLE LIVESTOCK
BY BONE DISTRICT, SOUTH SULAWESI PROVINCE**

Ani Martini

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: animartini@ipdn.ac.id

Muhammad Anwansa Wandu

Email: muhwandi1997@gmail.com

Abstract

This study aims to describe how Empowerment of Beef Cattle Breeders by the Livestock Service Office of Bone Regency, South Sulawesi Province. The study was conducted through direct observation in the field to extract data through interviews and supported by relevant literature reference sources to analyze data findings. This research uses descriptive qualitative method with inductive approach. The author uses the theory of Adisasmita (2006: 35), community empowerment is an effort to utilize and manage rural community resources more effectively and efficiently, with indicators of input aspects, process aspects, output aspects. The results of this study indicate that based on the indicators of community empowerment proposed by Adisasmita, the Empowerment of Beef Cattle Breeders by the Animal Husbandry Department of Bone Regency is not optimal because there are several obstacles in the community empowerment.

Keywords: Community Empowerment, Cattle Breeders

PENDAHULUAN

Salah satu jenis fauna yang banyak dijumpai dan dikembangbiakkan oleh masyarakat Indonesia adalah sapi potong. Daratan Indonesia yang luasnya mencapai 1.922.570 km² sangat mendukung kegiatan peternakan sapi potong yang notabene membutuhkan lahan yang luas. Posisi geografis Indonesia yang ada di daerah tropis yang memungkinkan wilayah Indonesia dijatuhi hujan dan disinari matahari setiap tahun sangat mendukung aktivitas peternakan sapi. Hal ini memudahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan peternakan seperti air dan pakan hijauan di Indonesia (wikipedia.org).

Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah ternak sapi potong terbesar di Indonesia. Produksi sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 berjumlah 1.434.999 (ditjenpkh.pertanian.go.id/). Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu produsen ternak dengan komoditas unggulan sapi potong, kambing, dan unggas. Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan sapi potong, karena



pemeliharaan ternak sapi telah menjadi usaha turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan tersebar ke seluruh kabupaten/kota yang ada namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memetakan tiga kabupaten yang menjadi sentra pengembangan ternak di daerah tersebut. Adapun ketiga kabupaten tersebut adalah Bone sebagai sentra pengembangan hewan ternak jenis sapi (besar), kemudian Jeneponto dengan hewan ternak kambing (kecil), serta Sidrap sebagai daerah sentra pengembangan itik (unggas). Kabupaten Bone merupakan daerah penghasil sapi potong terbesar di Sulawesi Selatan. (Kabar24.com.MAKASSAR).

Data statistik populasi ternak sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tabel 1.1 berikut ini:

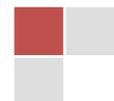
Tabel 1. Populasi Ternak Sapi Potong di Provinsi Sulawesi Selatan

No (1)	Kab/Kota (2)	Sapi potong (3)			
		2014	2015	2016	2017
1	Kab. Selayar	15994	16756	18070	18974
2	Kab. Bulukumba	65446	68344	70662	74195
3	Kab. Bantaeng	24863	26027	27782	29171
4	Kab. Jeneponto	27817	29925	30925	32503
5	Kab. Takalar	38410	36374	36025	37826
6	Kab. Gowa	104180	111345	107538	112915
7	Kab. Sinjai	92355	97638	101734	106821
8	Kab. Bone	325423	362819	395308	415073
9	Kab. Maros	72869	76381	80540	84567
10	Kab. Pangkep	45981	49585	53733	56046
11	Kab. Barru	65645	68805	70850	74393
12	Kab. Soppeng	36310	41327	46411	48763
13	Kab. Wajo	89858	100913	111968	117566
14	Kab. Sidrap	49960	54950	60433	63455
15	Kab. Pinrang	24048	24913	25794	27084
16	Kab. Enrekang	46288	46304	47589	49968
17	Kab. Tator	6659	6714	6961	7309
18	Kab. Palopo	3022	3096	3415	3586
19	Kab. Luwu	18133	17886	18870	19814
20	Kab. Luwu Utara	24852	26456	27963	29361
21	Kab. Luwu Timur	13740	14010	15021	15772
22	Kota Makassar	3219	3334	3409	3579
23	Kota Pare-Pare	4713	5090	5538	5815
24	Kab. Toraja Utara	352	450	422	443
	Jumlah	1200137	1289442	1366665	1434998

(1)

Sumber : Disnakkeswan.sulselprov.go.id

Masyarakat Kabupaten Bone sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak sapi potong karena merupakan pekerjaan yang sudah turun-temurun



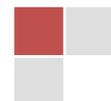
dilakukan karena itulah populasi sapi potong sangat tinggi di Sulawesi Selatan yang mencapai 415073 ekor ditahun 2017 namun metode berternak yang digunakan masih tradisional sehingga hasil dari peternakan sapi potong belum maksimal (Disnakkeswan.sulselprov.go.id).

Berdasarkan pengamatan Penulis dilapangan bahwa usaha peternakan yang ada di kabupaten Bone masih didominasi oleh peternakan rakyat dengan kapasitas produksi masih rendah. Kapasitas produksi yang rendah diperparah dengan penggunaan metode berternak yang masih sangat tradisional dan merupakan usaha sampingan karena disebabkan oleh keterbatasan biaya yang dimiliki peternak untuk membuat kandang, pemberian pakan hijauan dan pemeliharaan kesehatan hewan ternaknya.

Kurangnya perhatian peternak terhadap pemeliharaan kesehatan sapi pototngnya menyebabkan rentannya sapi pototng untuk terserang penyakit seperti yang terjadi pada tahun 2000 lalu terjadi penyebaran penyakit anthrax yang menimpa Kecamatan Awang Pone dan menewaskan puluhan ekor sapi dalam sekejap dan penyebaran penyakit ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bone namun juga terjadi di daerah lain disekitar Kabupaten Bone seperti Kabupaten Maros yang telah memakan 48 hewan tenak akibat penyakit Anthrax ini dan meskipun sudah menurun setiap tahunnya tetapi tetap ada ancaman penyebaran penyakit tersebut (tribunnews.com).

Penyebaran penyakit bukanlah satu-satunya masalah yang harus diwaspadai dan menjadi tantangan bagi peternak dan pemerintah Kabupaten Bone dalam memajukan usaha peternakan sapi potong di Kabupaten Bone tetapi adanya saingan dari daerah lain yang mengembangkan usaha peternakan sapi potong dengan kualitas sapi yang mampu bersaing dengan sapi potong yang ada di Kabupaten Bone (media.neliti.com). Hal ini mengakibatkan rendahnya kelahiran sapi yang tidak sebanding dengan angka penjualan, pematangan, kematian ternak, dan perdagangan atau pengeluaran sapi kewilayah lain di luar Sulawesi Selatan mengakibatkan semakin terbatasnya bibit pejantan dan betina (journal.uinalauddin.ac.id).

Kabupaten Bone sebagai sentra pengembangan hewan ternak jenis sapi (besar) yang dipetakan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan telah memberikan bantuan-bantuan kepada peternak seperti pemberian indukan sapi potong betina melalui bantuan dari Menteri Pertanian RI dan Provinsi. Bantuan dari Provinsi seperti kontraktor dan juga bibit beku yang semakin tahun semakin bertambah. Namun karena wilayah Kabupaten Bone yang Luas dan peternak sapi potongnya yang banyak tetapi tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan personil dari Dinas Peternakan yang masih kurang sehingga pemberdayaan peternak dan pengembangan usaha peternakan sapi potong belum bisa terlaksana dengan optimal. Lebih lanjut Suhendra (2006: 74-75) pemberdayaan adalah " suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergi mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi", maka pemberdayaan memerlukan wadah dan lembaga sebagai tempat masyarakat untuk mendalami dan mengembangkan potensinya juga adanya dorongan untuk memajukan dirinya secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya.



Pemerintah Kabupaten Bone terus berusaha mengembangkan Peternakan dengan lebih memberdayakan peternak sapi potong dengan berbagai inovasi seperti kandang selingkuh (Kawasan Andalan Sesuai Lingkungan Hidup), kontes ternak, dan karnaval sapi potong serta terus berusaha melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan peternakan seperti kendaraan dinas, rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kabupaten Bone mempunyai tugas dan tanggung jawab berkenaan dengan urusan yang menyangkut peternakan, Mengingat Kabupaten Bone telah dipetakan menjadi sentra pengembangan sapi(besar) oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Bone memberikan perhatian lebih terhadap peternakan sapi yang ada di Kabupaten Bone. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka seyogyanya Pemerintah Kabupaten Bone khususnya Dinas Peternakan mengembangkan peternakan sapi potong dalam rangka memberdayakan peternak sapi potong.

TEORI

Pemerintah Daerah

Huda (2005: 20) Pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut Siswanto (2008:5), sistem pemerintahan di Indonesia meliputi :

1. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah.
2. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Pemerintahan desa.

Urusan-urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah hal-hal yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengaturan perangkat daerah serta dinas-dinasnya. Selanjutnya Nugroho (2000:90), peran dari pemerintah daerah juga dimaksudkan untuk melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melaksanakan :

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.



Pemberdayaan Masyarakat

Wijaya (2003: 169), “pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya”. Selanjutnya Sumaryadi (2005:11), pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Pendapat dari kedua pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi pada dasarnya bertujuan sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pengembangan masyarakat melibatkan perubahan hubungan antara orang biasa dan orang-orang dalam posisi kekuasaan, sehingga setiap orang dapat mengambil bagian dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dimulai dari prinsip bahwa dalam masyarakat manapun ada banyak pengetahuan dan pengalaman yang jika digunakan dengan cara yang kreatif, dapat disalurkan ke dalam tindakan kolektif untuk mencapai tujuan masyarakat yang diinginkan.

Lebih lanjut Adisasmita menjelaskan kembali tentang pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

1. Aspek masukan (*input*)
2. Aspek proses (*process*).
3. Aspek keluaran (*out put*).

Aspek-aspek diatas merupakan rujukan penulis dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis pemberdayaan peternak sapi potong, disesuaikan dengan arah tujuan penelitian dalam rangka menggambarkan bagaimana Pemberdayaan Peternak Sapi Potong Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.



METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan deduktif. Teori yang dijadikan sebagai pisau analisis adalah teori pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Adisasmita (2006:35) bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari aspek masukan (*input*), aspek proses (*process*) dan aspek keluaran (*output*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menentukan sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan dari pejabat di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Bone antara lain Kepala Dinas Peternakan, Sekretaris Dinas Peternakan, Kepala Bidang, Kasubbag dan Kepala Seksi serta informan dari unsur masyarakat (peternak sapi potong) di Kabupaten Bone.

HASIL PENELITIAN

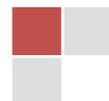
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Salah satu bentuk pemberdayaan adalah pengembangan. Pengembangan masyarakat berusaha untuk memberdayakan individu dan kelompok orang dengan menyediakan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghasilkan perubahan di komunitas mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk membangun masyarakat berdasarkan keadilan, kesetaraan dan saling menghormati.

Untuk melihat gambaran, maka akan diuraikan gambaran pemberdayaan peternak sapi potong oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Adisasmita (2006:35), untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari aspek masukan (*Input*), aspek proses (*process*) dan aspek keluaran (*output*). Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Aspek Masukan (*Input*)

Input adalah segala masukan yang akan di proses menjadi *output*. *Input* dalam pemberdayaan masyarakat antara lain sumber daya manusia (SDM) yakni peternak sapi potong dan Dinas Peternakan Kabupaten Bone. Secara umum peternak sapi potong di Kabupaten Bone memperoleh pengetahuan berternak sapi potong secara otodidak berdasarkan pengalaman yang didapatkan dari orang tua yang diwariskan secara turun temurun. Sebaian besar tingkat pendidikan formal peternak sapi potong adalah Sekolah Dasar (SD).

Peternak sapi potong di Kabupaten Bone umumnya menggunakan metode berternak secara tradisional seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka terdahulu. Saat ini sudah dikembangkan sistem beternak sapi potong secara modern namun peternak sapi di Kabupaten Bone belum pernah mencobanya karena belum mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang beternak sapi potong secara modern. Disamping itu, penghasilan dari berternak sapi potong dirasakan oleh peternak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh karena itu selain berternak

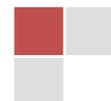


sapi mereka juga menanam padi. Hasil menanam padi cukup untuk makan dan jika sisanya dijual. Bekerja sebagai peternak sapi dan petani padi sudah menjadi mata pencaharian masyarakat di Kabupaten meskipun pendapatannya kecil.

Usaha lain yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam memberdayakan peternak sapi potong dengan meningkatkan motivasi melalui kontes hewan ternak sapi potong. Kontes hewan ternak sapi potong itu akan dipertontonkan sapi ternak yang memiliki bobot yang besar dengan berat mencapai lebih dari 1 ton sehingga para peternak tertarik dan terpacu untuk memperoleh informasi kepada Dinas Peternakan Kabupaten Bone perihal bagaimana cara menghasilkan sapi potong dengan kualitas yang baik seperti yang dipertontonkan dalam kontes tersebut. Selain kontes hewan ternak sapi potong ada juga penyuluhan safari Jumat, pemutaran video, dan siaran radio.

Dinas Peternakan di Kabupaten Bone mempunyai sumberdaya manusia yang sudah cukup memadai dengan tingkat pendidikan pegawai sebagian berpendidikan sarjana (S1 dan S2). Semua pegawai sudah menguasai bidangnya masing-masing karena sudah cukup lama bekerja di Dinas Peternakan. Sebagian besar pegawai di Dinas Peternakan Kabupaten Bone adalah pegawai sukarela. Dalam rangka memberdayakan peternak sapi potong, Dinas Peternakan Kabupaten Bone juga melibatkan partisipasi masyarakat seperti anak-anak muda yang dilatih dan tidak gaji dan mengajak pihak ketiga untuk turut serta memberikan sumbangan dan bantuan kepada peternak sapi potong sehingga masyarakat tidak selalu mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah semata tetapi masyarakat juga dapat mengelola usaha-usaha peternakan itu dalam kajian bisnis yang pada akhirnya akan menghemat anggaran dan menjadikan partisipasi ini sebagai kekuatan untuk kemandirian peternakan sapi potong di Kabupaten Bone sesuai dengan visi dan misi Bupati yaitu kemandirian masyarakat. Dinas Peternakan Kabupaten Bone mencoba membangun kemandirian peternak sapi potong agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah dengan menerapkan manajemen bisnis Corporation Planing didalam pengelolaan usaha peternakan.

Aspek masukan (*input*) lain dalam pemberdayaan sapi adalah sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan sarana dan prasarana penting dalam menunjang suatu kegiatan. Salah prasarana pendukung dalam kegiatan pemberdayaan peternak sapi potong adalah modal/dana. Berdasarkan hasil wawancara bahwa meskipun Kabupaten Bone telah ditetapkan sebagai kawasan ternak sapi potong di Sulawesi Selatan namun dana yang dianggarkan untuk sektor peternakan sapi potong masih relatif rendah. Sarana dan prasarana pendukung yang lainnya adalah penggunaan teknologi dalam mengembangkan ternak sapi potong. Adapun teknologi yang sudah digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi sapi potong di Kabupaten Bone berupa teknologi Inseminasi Buatan (IB) namun belum didukung laboratorium untuk melakukan transgenetik atau rekayasa genetik untuk mendapatkan hewan ternak yang lebih berkualitas. Disamping itu, penggunaan teknologi juga sudah dilakukan pada pengolahan limbah menjadi pupuk organik, bio gas dan pengolahan pakan



menggunakan teknologi. Teknologi yang digunakan masih relatif sederhana dan karena keterbatasan dukungan anggaran.

Aspek Proses (*process*).

Proses adalah kejadian atau pelaksanaan yang berurutan dan bersama – sama saling terkait dalam mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output), pelaksanaan ini menggunakan berbagai sumber daya yang dapat dikelola oleh manusia, alam, atau mesin sekalipun. Dinas Peternakan Kabupaten Bone telah merencanakan dan membuat program pemberdayaan peternak sapi potong meliputi peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana (modal, bibit, vaksin, alat-alat inseminasi buatan, dan lain-lain), pemberian penghargaan (reward) kepada peternak yang sukses, sosialisasi sistem beternak secara modern, mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ternak sapi potong, memberikan penyuluhan kepada peternak secara rutin, pembinaan terhadap lembaga usaha ternak sapi potong, pengolahan hasil ternak menjadi produk olahan serta memfasilitasi pemasaran hasil ternak sapi potong.

Proses pemberdayaan peternak sapi potong di Kabupaten Bone dimulai dengan menyusun rencana program kerja melalui musrembang dengan melibatkan unsur masyarakat. Program kerja dilaksanakan berdasarkan analisis strategi sesuai dengan skala prioritas yang dapat membangun kemandirian peternak sapi potong sehingga tercipta efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Pelaksanaan program kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bone telah sesuai dengan aturan tetapi keterbatasan dana APBD yang tersedia maka hanya sebatas memfasilitasi saja. Peran Dinas Peternakan lebih kepada pemantik saja, mendorong, dan memotivasi peternak sapi potong agar dapat belajar secara mandiri menjadi peternak sapi potong yang sukses dan mampu membawa perubahan dan kemajuan kesejahteraan hidupnya

Dalam menjalankan program kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bone perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional dibidangnya. Peningkatan sumberdaya manusia dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Bone dan pendidikan dan pelatihan kepada peternak sapi potong. Peningkatan sumberdaya manusia juga dilakukan melalui pemberian penyuluhan kepada peternak sapi potong tentang sistem beternak sapi potong secara modern, pemeliharaan dan perawatan sapi potong, penanggulangan penyakit pada sapi potong, pengolahan sapi potong pasca panen menjadi produk yang bernilai jual tinggi, pengolahan limbah sapi potong, manajemen pemasaran sapi potong serta monitoring dan evaluasi program kerja.

Setiap pelaksanaan program kerja Dinas Peternakan diikuti dengan aktivitas monitoring yang dilakukan agar kegiatan dapat berjalan lancar sesuai rencana. Monitoring diperlukan untuk mengetahui kesalahan awal agar dapat segera diperbaiki sehingga mengurangi resiko terjadinya kesalahan yang lebih besar. Monitoring terhadap pelaksanaan program kegiatan telah dilaksanakan, namun pada proses monitoring



belum maksimal karena kurangnya dukungan personil serta wilayah Kabupaten Bone yang sangat luas dan belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti kurangnya kendaraan dinas.

Selanjutnya hasil kegiatan monitoring dilakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dinilai kurang atau perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan atau program kerja selanjutnya agar lebih baik kedepannya. Evaluasi telah dilakukan tetapi dalam penanganan masalahnya tidak selalu diselesaikan dengan pemberian bantuan tetapi lebih diarahkan pada mendorong kemandirian masyarakat khususnya peternak sapi potong agar mampu mengembangkan usahanya dan menghargai mereka dengan melihat mereka sebagai subyek pembangunan bukan obyek pembangunan.

Proses pemberdayaan peternak sapi potong sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang menghambat proses tersebut, antara lain :

1. wilayah Kabupaten Bone yang sangat luas namun memiliki keterbatasan sumberdaya manusia khususnya tenaga penyuluh pada Dinas Peternak Kabupaten Bone.
2. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai seperti anggaran, kendaraan dinas, dan peralatan berternak yang modern.
3. Sebagian masyarakat masih mempertahankan cara beternak sapi potong secara tradisional.

Aspek keluaran (*out put*).

Aspek keluaran (*out put*) meliputi pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi. Pencapaian adalah suatu cara atau proses mencapai tujuan sedangkan sasaran lebih bersifat rinci dan memperlihatkan langkah-langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan. Untuk pencapaian target, Dinas Peternakan Kabupaten Bone menetapkan target sesuai dengan kemampuan daerah, sumberdaya manusia, luas wilayah dan ketersediaan anggaran. Pencapaian sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Bone senantiasa melebihi target yang telah ditetapkan meskipun dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat hambatan-hambatan namun masih bisa dilakukan upaya penanganannya melalui melakukan inovasi sehingga hambatan tersebut dapat diatasi. Inovasi yang dilakukan selanjutnya dijadikan sebuah cara baru dalam penanganan masalah kedepannya.

Pencapaian realisasi terhadap sasaran/target menjadi bahan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya. Pencapaian sasaran memiliki rentang nilai dan rentang waktu. Sasaran nilai waktu dan sasaran nilai kuantitas menjadi bahan evaluasi untuk tindakan selanjutnya, namun tidak berhenti pada evaluasi tetapi harus dilakukan analisis hasil evaluasi sehingga menghasilkan suatu rekomendasi. Rekomendasi bisa berupa modifikasi dan inovasi untuk menjadi replikasi bagi yang lain, namun tidak semua pegawai mampu melakukan analisis seperti itu.



Sasaran terhadap ternak sapi potong meliputi populasi sapi potong dan produk olahan sapi potong. Populasi sapi potong di Kabupaten Bone selalu meningkat tiap tahun melalui program Inseminasi Buatan (IB). Inseminasi Buatan senantiasa digencarkan oleh Dinas Peternakan kepada pada peternak bukan hanya meningkatkan produksi/ kuantitas ternak sapi potong tetapi juga untuk memperbaiki kualitas genetik sapi potong. Sebelumnya menggunakan IB, peternak hanya mengandalkan kawin alami alami yang menghasilkan sapi potong yang kurang baik (ukuran tubuh sapi potong kecil) sehingga mutu genetiknya menurun dan berdampak pada rendahnya harga jual. Program Inseminasi Buatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan peternak karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh penyuluh, khususnya kesulitan dalam berkomunikasi dengan peternak sapi potong dikarenakan masih terdapat peternak sapi potong yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, karena apabila komunikasi dalam hal penyampaian informasi yang diberikan oleh penyuluh tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh peternak sapi potong maka akan terjadi *misinterpretation* antara penyuluh dan peternak sapi potong sehingga menimbulkan keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

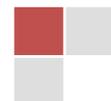
Tabel 2. Populasi Ternak Sapi Potong di Kabupaten Bone

No	Tahun	Populasi Sapi Potong
1	2014	325423
2	2015	362819
3	2016	395308
4	2017	415073

Sumber: Disnakkeswan.sulselprov.go.

Disamping populasi sapi potong, sasaran lain dari Dinas Peternakan Kabupaten Bone adalah produk olahan sapi potong. Produk olahan sapi potong yang dikembangkan oleh masyarakat melalui kelompok usaha antara lain olahan bakso, sosis, abon dan nugget. Kelompok usaha produksi olahan daging sapi potong dibina secara rutin (2 kali seminggu) oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone melalui memantau produk-produk olahan yang layak jual dan layak dikonsumsi bekerjasama dengan bagian Kesehatan Hewan (Keswan). Selain daripada itu, Dinas Peternakan Kabupaten Bone juga turut membantu kelompok usaha produksi olahan daging sapi potong dalam memasarkan hasil produksinya.

Aspek keluaran (*out put*) dari pemberdayaan peternak sapi potong lainnya adalah efektivitas. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dan target Dinas Peternakan Kabupaten Bone terhadap ternak sapi potong sudah terealisasi. Peternak sapi potong sudah merasakan perubahan dan kemajuan baik dari kuantitas produksi sapi potong maupun kualitas sapi potong yang semakin baik.



Aspek keluaran (*out put*) selain dari sasaran dan efektivitas adalah efisiensi. Efisiensi dapat diukur dari tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses. Dinas Peternakan Kabupaten Bone telah berusaha menghemat sumber daya yang ada baik berupa dana bantuan maupun sumberdaya manusia (pegawai). Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam melaksanakan pemberdayaan peternak sapi potong dibantu oleh 80 % pegawai sukarela dan melibatkan partisipasi masyarakat seperti anak-anak muda sebagai tenaga sukarela tanpa digaji yang didik dan dilatih untuk dapat memberdayakan peternak sapi potong. Pemerintah Kabupaten Bone telah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur sumbangan pihak ketiga agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan-bantuan dari pemerintah tetapi masyarakat mengelola usaha-usaha peternakan itu dalam kajian bisnis sehingga dapat menghemat anggaran dan menjadikan partisipasi ini sebagai kekuatan untuk membangun jiwa usaha dan kemandirian peternak sapi potong di Kabupaten Bone.

PENUTUP

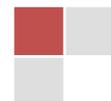
Kesimpulan

Pemberdayaan peternak sapi potong telah dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone namun belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberdayaan peternak sapi potong yang meliputi tiga aspek yaitu aspek masukan (*input*), aspek proses (*process*) dan aspek keluaran (*out put*). Hambatan pada aspek masukan (*input*) antara lain masih terdapatnya peternak sapi potong yang menggunakan metode beternak secara tradisional, kurangnya tenaga penyuluh, belum adanya laboratorium untuk melakukan transgenetik atau rekayasa genetik untuk mendapatkan hewan ternak yang lebih berkualitas.

Adapun hambatan dari aspek proses (*process*) antara lain keterbatasan dana APBD yang tersedia menyebabkan Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam memberdayakan peternak sapi potong umumnya sebatas memfasilitasi saja, Sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai seperti anggaran, kendaraan dinas, dan peralatan beternak yang modern. kegiatan monitoring belum maksimal karena kurangnya dukungan personil dan kendaraan dinas serta wilayah Kabupaten Bone yang sangat luas.

Selanjutnya hambatan dari aspek keluaran (*output*) antara lain tidak semua pegawai pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone yang memiliki kemampuan menganalisis dan berinovasi dalam menyelesaikan masalah, Program Inseminasi Buatan (IB) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh peternak sapi potong sehingga kualitas sapi potong masih relatif rendah dan berdampak pada rendahnya harga jual sapi potong serta masih terdapatnya peternak sapi potong yang memiliki keterbatasan penguasaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.

Berbagai hambatan dalam pemberdayaan peternak sapi potong di Kabupaten Bone maka untuk mengatasi hambatan tersebut disarankan antara lain Pemerintah Kabupaten Sumedang meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan peternak sapi potong, mendorong peternak sapi potong untuk menerapkan metode beternak secara



modern, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada peternak sapi potong secara lebih intensif dan berkelanjutan terkait metode/teknik beternak secara modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Rianto. 2000. *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*. Jakarta: Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Raharjo Adisasmita. 2006. . *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siswanto, Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: grafika.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Wijaya, HAW. 2003. *Otonomi Desa. Jakarta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- disnak.bone.go.id (website resmi Dinas Peternakan Kabupaten Bone)
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/07/10-negara-megadiverse-di-dunia>
- http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2017
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geograf>
- [http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2017_\(ebook\)](http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2017_(ebook))

